

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja dalam pembangunan mutlak diperlukan, karena merekalah yang akan melaksanakan pembangunan ekonomi itu. Karena bagaimanapun lengkapnya serta modernnya alat peralatan yang dipergunakan harus selalu didampingi oleh tenaga kerja manusia, supaya alat peralatan itu dapat bermanfaat. Jadi dalam pembangunan masalah tenaga kerja dan sumber daya manusia (*human resources*) perlu mendapat perhatian yang serius daripada pemerintah. Tenaga kerja adalah setiap orang yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan dan mampu untuk bekerja serta memenuhi persyaratan peraturan perburuhan suatu negara.¹

Di dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan istilah tenaga kerja manusia (*labour*) bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya. hal yang dimaksudkan disini memang bukanlah sekedar *labour* atau tenaga kerja saja, tetapi lebih luas lagi yaitu, *human resources* (sumber daya manusia).

Istilah yang tersebut terakhir itu nyata lebih luas artinya daripada hanya sekedar *labour* saja. Didalam istilah *human resources* atau sumber daya manusia itu, tercakuplah tidak saja tenaga fisik atau tenaga jasmani manusia tetapi juga kemampuan mental atau kemampuan nonfisiknya, tidak saja tenaga terdidik tetapi tenaga yang tidak terdidik, tidak saja tenaga yang terampil

¹ Julis R. Latumerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 56

tetapi juga yang tidak terampil. Pendek kata dalam istilah atau pengertian *human resources* itu terkumpul semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, benarliah jika ada orang yang berkata bahwa kualitas atau mutu sumber daya manusia suatu bangsa itu tergantung pada kualitas atau mutu ketaqwaan, kesehatan, kekuatan fisik, pendidikan, serta kecakapan penduduknya.²

Angkatan kerja terdiri atas laki-laki dan perempuan, dan merupakan salah satu faktor produksi yang berlimpah di Indonesia. Tahun 2002, jumlah angkatan kerja di Indonesia diperkirakan sebesar 100 juta orang, termasuk mereka yang sedang bekerja dan yang menganggur. Bank Dunia menyebutkan bahwa lebih dari 41% dari jumlah tersebut adalah wanita, sedangkan sisanya adalah laki-laki. Angka 41% ini lebih tinggi dari angka pada tahun 1980, yaitu sebesar 35%. Kenaikan ini mencerminkan turunnya diskriminasi antara jenis pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita.

Angkatan kerja dapat digolongkan lebih lanjut menjadi tenaga terampil dan kurang terampil, Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh tenaga kerja yang kurang terampil, karena kurangnya program pelatihan, pendidikan formal, transformasi teknologi, dan penggunaan mesin-mesin baru. Kebanyakan dari mereka bekerja di sektor pertanian dan industri

²Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Makro & Mikro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 56

manufaktur yang bersifat padat karya seperti pakaian jadi, perkayuan, sepatu, dan industri makanan.³

Penduduk yang menawarkan tenaga kerja tetapi belum berhasil memperoleh pekerjaan dianggap terus mencari pekerjaan. Maka dari itu, mereka yang tidak bekerja tidak semata-mata dikelompokkan sebagai penganggur, tetapi lebih tepat sebagai pencari kerja. Secara konsepsional, mereka yang dikatakan menganggur (*unemployed*) harus memenuhi persyaratan bahwa mereka juga aktif mencari pekerjaan. Mereka yang tidak bekerja, tetapi juga tidak aktif mencari pekerjaan tidak dimasukkan sebagai penganggur. Mereka ini mungkin “*idle*” atau menikmati waktu senggang (*leisure*). Mereka ini aktif, tetapi kegiatannya tidak dipasarkan di pasar tenaga kerja.

Dilihat dari komposisi angkatan kerja tersebut, maka jumlah pencari kerja menunjukkan luasnya kelebihan penawaran tenaga kerja di atas permintaannya (*excess demand of labor*). Disamping itu, luasnya pengangguran juga dapat dinyatakan relatif, yaitu jumlah pencari kerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Rasio biasanya dinyatakan dalam presentase, disebut tingkat pengangguran. Tingkat ini secara konsepsional sangat bermakna karena hubungan kelebihan tingkat pengangguran dengan laju pertumbuhan ekonomi.⁴

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Banten pada Februari 2016 mencapai 5.686 ribu orang, berkurang sebesar 11 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2015 yang

³Toni Hartono, *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 83

⁴Afrida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 73

sebesar 5.697 ribu orang. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2016 sebesar 5.234 ribu orang, bertambah 26 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2015. Selama setahun terakhir (Februari 2015 – Februari 2016), kenaikan orang bekerja didukung oleh kenaikan jumlah tenaga kerja di tiga sektor, yaitu sektor konstruksi, sektor lembaga keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi.

Lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak adalah di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi yang menyerap 1.283 ribu orang atau hampir seperempat penduduk yang bekerja (24,51 persen). Pada Februari 2016, penduduk bekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih mendominasi yaitu sebanyak 1.818 ribu orang (34,73%).⁵ Artinya terdapat 452 ribu angkatan kerja yang belum terserap menjadi tenaga kerja atau yang masih menganggur, walaupun kenaikan orang bekerja didukung oleh kenaikan jumlah tenaga kerja di tiga sektor, yaitu sektor konstruksi, sektor lembaga keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi namun belum sepenuhnya bisa menyerap tenaga kerja di Provinsi Banten.

Di negara-negara miskin perhatian utama justru dipusatkan pada masalah yang menyangkut dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan. Banyak negara di Dunia ketiga yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi menurut standar

⁵“Keadaan Ketenagakerjaan Banten Februari 2016” <https://banten.bps.go.id/Brs/view/id/249> (Di unduh tanggal 19 Januari 2017 pukul 14:15 WIB)

sejarah pertumbuhan selama tahun 1960-an, mulai menyadari bahwa pertumbuhan demikian itu ternyata hanya memberikan masalah atau keuntungan yang tidak seberapa bagi masyarakat miskin.

Kenyataan menunjukkan bahwa ratusan jiwa Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin, taraf kehidupan mereka tetap tidak berubah dan bahkan di sejumlah negara cenderung menurun, tidak hanya selama satu tahun 1960-an tetapi juga selama tahun 1970-an dan 1980-an. Tingkat pengangguran dan semi pengangguran di desa-desa dan wilayah kota cenderung meningkat. Distribusi pendapatan diantara yang kaya dan yang miskin semakin memburuk kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak penduduk merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat justru telah gagal menghapuskan atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan absolut yang meluas yang tetap menjadi kenyataan kehidupan ekonomi di hampir semua negara yang sedang berkembang.⁶

Sejarah perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa pemerintahan orde baru selain menekan angka kemiskinan, juga berhasil menjaga tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan untuk tidak meningkat secara berarti pada saat ekonomi mengalami pertumbuhan pesat, yang biasanya terjadi pada awal periode pembangunan selama 1965-1970, rata-rata laju pertumbuhan PDB di Indonesia masih sangat rendah sekitar 2,7 persen, dan koefisien gini rata-rata pertahun sebesar 0,35. Selama 1971-1980 laju pertumbuhan PDB jauh lebih besar, rata-rata 6 persen pertahun dengan koefisien gini rata-rata pertahun sedikit diatas 0,4.

⁶Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 201

Hal ini berarti selama periode itu, pertumbuhan memang sangat baik namun kesenjangan pendapatan yang diukur dengan distribusi pengeluaran konsumsi semakin memburuk. Sedangkan, selama 1981-1990 pertumbuhan PDB 5,4 persen pertahun dan koefisien gini rata-rata pertahun sedikit diatas 0,3. Walaupun ada variasi antara tahun-tahun tertentu, perubahan koefisien tersebut menandakan bahwa, dibandingkan 1960-an hingga 1970-an, tingkat ketidakmerataan pembagian pendapatan di tanah air selama dekade 80-an, menunjukkan penurunan.

Menurut daerah, pada tahun 1960-an, tingkat kesenjangan pengeluaran konsumsi di pedesaan lebih besar dari pada di perkotaan. Baru sejak 1970-an ada perbaikan: angka rasio gini di pedesaan setiap tahun lebih rendah daripada di perkotaan. Selama 1980-1999 nilai rasio gini di pedesaan berkisar antara 0,26 (terendah) dan 0,31 (tertinggi), sedangkan di perkotaan rata-rata 0,33. Pada tahun 2004, indeks gini di pedesaan tercatat sekitar 0,27 dan di perkotaan 0,35, dan relatif sama pada tahun 2009.⁷

Terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengangguran yang tinggi dengan semi pengangguran disatu pihak dan kemiskinan yang meluas dengan distribusi pendapatan yang tidak adil (tidak merata) dipihak yang lain. Yang menyangkut hubungan antara pengangguran dan kemiskinan, satu hal tetap benar yaitu bahwa salah satu mekanisme menurunnya kemiskinan dan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan di negara-negara yang sedang berkembang adalah berupa ketentuan-ketentuan mengenai

⁷ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Empiris* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 202

pengupahan yang cukup serta pemberian kesempatan pada si miskin untuk bisa bekerja secara produktif.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“PENGARUH JUMLAH PENCARI KERJA TERHADAP KESENJANGAN PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2011-2015”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Walaupun kenaikan orang bekerja didukung oleh kenaikan jumlah tenaga kerja di tiga sektor, yaitu sektor konstruksi, sektor lembaga keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi namun masih banyak angkatan kerja yang belum terserap menjadi tenaga kerja atau yang masih menganggur mencari pekerjaan.
2. Distribusi pendapatan diantara yang kaya dan yang miskin semakin memburuk kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Banyak penduduk merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat justru telah gagal menghapuskan atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan absolut yang meluas yang tetap menjadi kenyataan kehidupan ekonomi di hampir semua negara yang sedang berkembang

⁸ Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang....*, 308

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah penelitian yaitu:

1. Berapa besar tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah di Provinsi Banten setiap tahunnya?
2. Adakah pengaruh jumlah pencari kerja terhadap kesenjangan pendapatan antar daerah di Provinsi Banten?
3. Berapa besar pengaruh jumlah pencari kerja terhadap kesenjangan pendapatan antar daerah di Provinsi Banten?

D. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan maka masalah pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Jumlah pencari kerja dibatasi pada jumlah pencari kerja menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Banten pada tahun 2011-2015.
2. Kesenjangan pendapatan menggunakan data jumlah penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten, dan PDRB perkapita Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2011-2015 yang dihitung menggunakan indeks Williamsons.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis berapa besar tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah di Provinsi Banten.

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh jumlah pencari kerja terhadap kesenjangan pendapatan antar daerah di Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui tingkat pengaruh jumlah pencari kerja terhadap kesenjangan pendapatan antar daerah di Provinsi Banten.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi bahan evaluasi kebijakan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan kesenjangan pendapatan bagi pemerintah setempat.
2. Menambah wawasan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan yang diperoleh diperkuliahan dengan permasalahan di lapangan yang sebenarnya.
3. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut UU No. 13 tahun 2003, angkatan kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja (tenaga kerja), yang sedang mencari pekerjaan, sekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir (pencari kerja, bersekolah dan

mengurus rumah tangga) meskipun sedang tidak bekerja mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja⁹

Lewis mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan, yaitu:

Kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain.

Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan). Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katub pengaman ketenagakerjaan.

Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja disektor industri (sektor modern) oleh sektor informal, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga kelebihan penawaran pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak pernah menjadi terlalu banyak.¹⁰

⁹Hendro Ekwarso “Analisis Angkatan Kerja Antar Pulau di Indonesia Tahun 2012-2013,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Vol. IV, No. 11, (Maret, 2014), 179

¹⁰Chairul Nizar, Abu Bakar Hamzah, Sofyan Syahnur, “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala*, Vol. 1, No.2, (Mei,2013), 3

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat.

Menurut Sukirno dalam Fatmawati “pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain”. Menurut Sukirno dalam Fatmawati “pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan.”¹¹

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Ada beberapa macam kesenjangan yang kerap kali mengganjal suatu masyarakat dalam usaha mencapai kesenjangan, yaitu : (1) kesenjangan antar daerah, (2) kesenjangan antar sektor, dan (3) kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat. Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan, yaitu: Kurva Lorenz, Indeks Gini, dan kriteria Bank Dunia, Indeks Williamson.¹²

Salah satu indikator distribusi pendapatan lain yang lazim digunakan oleh para ekonom adalah distribusi fungsional atau

¹¹ Fatmawati M. Lumintang, “Analisis Pendapatan Petani Padi di Desa Teep Kecamatan Lawongan Timur,” *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3, (September 2013), 992

¹²Hadi Sasana, “Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal,” *Jurnal Bisnis Ekonomi (JBE)*, Vol. 16, No.1, (Maret 2009), 54

distribusi pangsa pendapatan atas faktor produksi (*factor share distribution*). Indikator ini berusaha untuk menjelaskan pangsa (*share*) pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal, kewirausahaan. Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya memfokuskan perhatiannya pada presentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha (faktor produksi) yang terpisah dan kemudian membandingkannya dengan presentase pendapatan total yang berwujud sewa, bunga dan laba (masing-masing merupakan hasil perolehan atas faktor produksi tanah, modal dan kewirausahaan).¹³

Kesenjangan pendapatan merupakan ketimpangan relatif pendapatan antar golongan masyarakat yang diukur dengan Gini Ratio yang diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (ketidakmerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana kurva Lorenz itu berada. Ukuran gini ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1.

Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Dari segi penyebabnya, Todaro dalam Suryana Utama mengatakan, kesenjangan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya

¹³Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta:Unit Penerbit dan Pencetakan STIM YKPN Yogyakarta, 2010), 286

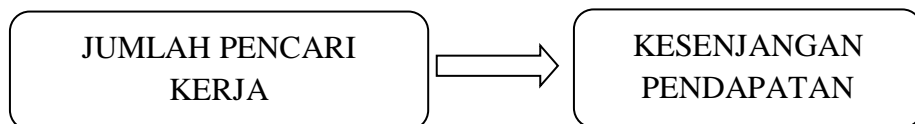
pendapatan perkapita, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang, dan investasi.

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Ketimpangan tersebut terjadi karena sektor-sektor utama daerah hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja.

Fleisher mengatakan bahwa :

faktor penentu kesenjangan antar wilayah meliputi investasi modal fisik, modal manusia, dan modal infrastruktur. Adanya ketimpangan akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu, daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Selain memberikan dampak positif, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil. Selain itu, ketimpangan antar wilayah akan mengakibatkan migrasi penduduk yang bekerja dan berpindahnya modal dari daerah yang tertinggal menuju daerah yang maju.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



¹⁴ Ni Luh Putu Yuni Adipuryanti dan I Ketut Sudibia, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Berkerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali," *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Vol. XI No. 1 (Juli, 2015), 21.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dikelompokkan menjadi 5 bab dan setiap bab dikelompokkan dalam beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian teoritis, pada bab ini berisi pendokumentasian atau pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama dan landasan teori. Landasan teori ini membahas mengenai teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian sebagai landasan dasar dari penulisan skripsi.

Bab III Metode Penelitian, menguraikan tentang Ruang Lingkup Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Uji Hipotesis.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Menguraikan tentang deskripsi data dan analisis hasil yang dihasilkan secara jujur apa adanya.

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi uraian mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas terhadap rumusan masalah yang diajukan pada bab I, II, III dan IV. Kemudian terdapat saran yang dibuat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dapat ditujukan kepada pengambil kebijakan, pengguna hasil penelitian ataupun penelitian sebelumnya.